

Implementation of the Simpeldesa Application as an Effort to Realise a Digital Village (Study in Tambak Kalisogo Village)

[Implementasi Aplikasi Simpeldesa Sebagai Upaya Perwujudan Desa Digital (Studi di Desa Tambak Kalisogo)]

Sylvi Rachma Aulia¹⁾, Isna Fitria Agustina ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze and describe the implementation of the Simpeldesa Application as a strategic step toward realizing a digital village in Tambak Kalisogo Village. This study employs a qualitative descriptive method, with data collection techniques including face-to-face interviews with village officials and residents, observation of the Simpeldesa Application's use, and documentation. The results indicate that the implementation of the Simpeldesa Application in the communication aspect proceeds through two-way communication, clarity of information, and consistency of guidance. Regarding the resource aspect, the implementation is supported by a legal framework, meets regulatory compliance, and involves active participation of village officials in operating the application, despite limitations in internet access and digital literacy. Regarding the disposition aspect, the village government and the community demonstrated a positive acceptance of digital village development. Regarding the bureaucratic structure aspect, the village government has not yet established village regulations specifically governing the management of the Simpeldesa Application.*

Keywords - Policy Implementation; Simpeldesa; Smart Village

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Aplikasi Simpeldesa sebagai langkah strategis dalam mewujudkan desa digital di Desa Tambak Kalisogo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan perangkat desa dan masyarakat, observasi penggunaan Aplikasi Simpeldesa, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Aplikasi Simpeldesa pada aspek komunikasi berjalan melalui komunikasi dua arah, kejelasan informasi, dan konsistensi arahan. Aspek sumber daya, implementasi didukung oleh dasar kewenangan, dan telah memenuhi kepatuhan regulasi, serta keterlibatan aktif perangkat desa dalam pengoperasian aplikasi, meskipun terdapat keterbatasan akses jaringan internet dan literasi digital. Aspek disposisi, pemerintah desa dan masyarakat mencerminkan penerimaan positif terhadap pengembangan desa digital. Aspek struktur birokrasi, pemerintah desa belum memiliki regulasi desa yang secara khusus mengatur pengelolaan Aplikasi Simpeldesa.*

Kata Kunci - Implementasi Kebijakan; Simpeldesa; Desa Digital

I. PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital, konsep *smart village* menjadi salah satu strategi penting dalam perwujudan pembangunan desa berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) [1]. Desa Tambak kalisogo sebagai salah satu desa yang secara responsif mengusung perkembangan teknologi melalui Aplikasi Simpeldesa (Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa) sebagai upaya nyata menuju *smart village* dan perwujudan *smart city*. Inovasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di tingkat desa, tetapi juga memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan data desa secara terpadu.

Implementasi desa digital Selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta diperkuat oleh Permendesa PD TT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menekankan urgensi digitalisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif. Melalui Aplikasi Simpeldesa, pemerintah didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan administrasi, yang selaras dengan pencapaian tujuan SDGs seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan akses informasi, dan inovasi kelembagaan.

Komitmen digitalisasi di tingkat kabupaten selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju *Smart City*, yang menekankan pada penguatan infrastruktur, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta integrasi data guna mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien. Regulasi tersebut, diposisikan sebagai instrumen strategis daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang

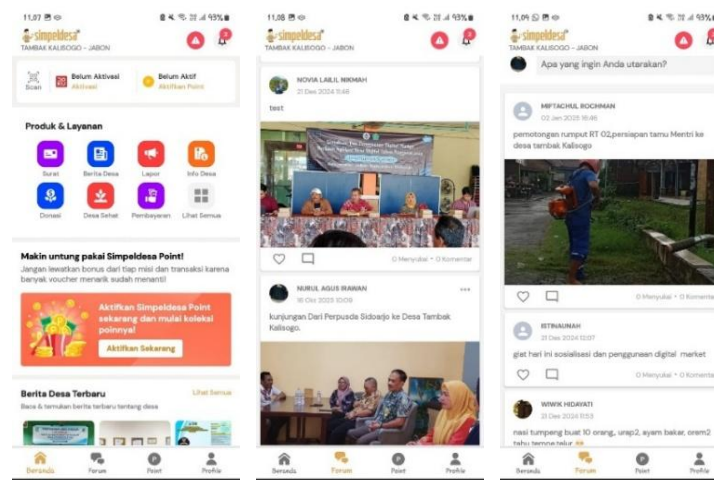
akuntabel, dan transparan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, penyelenggaraan desa digital memiliki cakupan luas karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan desa digital harus di laksanakan secara terpadu dan terarah melalui kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, badan usaha, dan masyarakat.

Salah satu wujud nyata kolaborasi dalam mendukung digitalisasi desa adalah kemitraan antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo dengan PT Telkom Indonesia (Persero). Dalam kerja sama tersebut, PT Telkom Indonesia berperan sebagai penyedia layanan utama (*provider*) dalam pengembangan dan pengoperasian Aplikasi Simpeldesa. Melalui program *Smart Village* Nusantara (SVN), PT Telkom Indonesia berkomitmen menghubungkan desa-desa di seluruh Indonesia melalui satu platform digital yang terintegrasi. Wujud konkret dari konsep *smart village* yang ada di Aplikasi Simpeldesa berlandaskan pada tiga unsur utama, yakni *smart governance*, *smart society*, dan *smart economy*.



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Simpeldesa Melalui Akun Operator Desa
Sumber: Website Aplikasi Simpeldesa

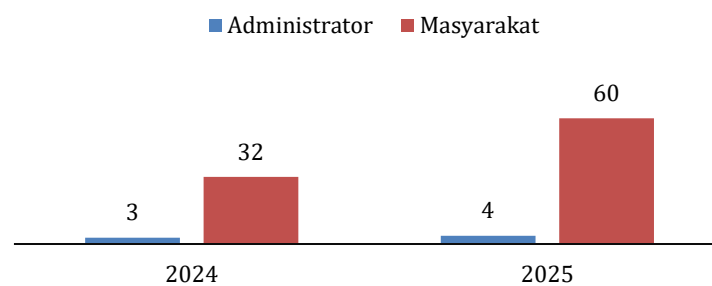
Dalam pilar *smart governance* memuat berbagai fitur yang mempermudah tata kelola pemerintahan dan sistem manajemen desa, seperti data warga, layanan surat, laporan stunting, lapor desa, serta berita desa. Dalam hal ini fitur tersebut berfungsi membantu pemerintah desa dalam mengambil langkah kebijakan yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Selanjutnya, pilar *smart society* mencakup fitur-fitur yang berfungsi membangun kepedulian dan interaksi sosial masyarakat, antara lain forum desa, *panic button*, simpel donasi, dan desa sehat. Dalam fitur ini masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi, membangun sikap gotong royong, dan saling membantu serta dapat berkonsultasi mengenai kesehatan dengan bidan desa. Sementara itu, pilar *smart economy* menyediakan fitur-fitur yang mendukung pengembangan perekonomian desa, serta penguatan BUMDes dengan meningkatkan partisipasi warga dan UMKM, seperti pasar desa, pembayaran tagihan (PPOB), mitra BUMDes, dan ads management. Setiap transaksi yang terjadi pada Aplikasi Simpeldesa dilakukan melalui mekanisme bagi hasil dengan BUMDes, kondisi tersebut dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi APBDes.



Gambar 2. Fitur Forum Desa Melalui Aplikasi Warga Desa
Sumber: Akun Aplikasi Simpeldesa Warga

Melalui Aplikasi Simpeldesa PT Telkom Indonesia berupaya mensinergikan berbagai kegiatan desa dan masyarakat ke dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi Simpeldesa dirancang sebagai platform terpadu untuk mengelola data manajemen desa dan pelayanan administrasi, sekaligus menjadi sarana forum sosial serta pengembangan ekonomi lokal, yang diharapkan mampu mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Secara operasional, pengelolaan Aplikasi Simpeldesa dilaksanakan oleh operator desa sebagai administrator utama, dibantu oleh kaur perencanaan, kaur tata usaha, dan kasi pelayanan. Masyarakat desa dapat mengakses Aplikasi Simpeldesa melalui handphone Android, yang dirancang dengan tampilan sederhana agar mudah dioperasikan oleh berbagai kalangan.

Digitalisasi desa dapat dipahami sebagai upaya integratif untuk mengadopsi teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa [2]. Kehadiran Aplikasi Simpeldesa di Desa Tambak Kalisogo pada dasarnya membuka peluang besar dalam meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan kemudahan dalam proses administrasi, mempercepat akses informasi, serta mendukung transparansi dalam tata kelola data desa [3]. Selain itu, Simpeldesa juga berperan sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga selaras dengan semangat mewujudkan desa digital yang inklusif dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemanfaatan aplikasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tantangan baik dari aspek infrastruktur maupun kesiapan sumber daya manusia.



Grafik 1. Pengguna Aplikasi Simpeldesa di Desa Tambak Kalisogo Tahun 2024 - 2025

Sumber: Rekap Desa Pengguna Aplikasi Simpeldesa

Berdasarkan grafik di atas, tingkat pemanfaatan Aplikasi Simpeldesa di Desa Tambak Kalisogo masih tergolong rendah, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami. Hal tersebut tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor, Pertama, keterbatasan akses jaringan internet. Kedua, kesenjangan literasi digital, terutama pada masyarakat lanjut usia dan keterbatasan sosialisasi. Ketiga belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur Aplikasi Simpeldesa. Kondisi tersebut tentunya berdampak pada keterlambatan penyampaian informasi, terhambatnya proses administrasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, akses internet telah menjadi sarana vital dalam menunjang pelayanan publik, baik pengelolaan, dan pengawasan administrasi, serta pengembangan ekonomi masyarakat [4]. Dalam upaya percepatan transformasi digital, akses jaringan internet merupakan syarat utama dalam perwujudan desa digital [5]. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi desa digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan inovasi aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya.

Digitalisasi desa bukan hanya tentang akses jaringan internet, di balik itu terdapat upaya besar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam memanfaatkan teknologi digital. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui sosialisasi, namun sosialisasi yang dilakukan secara terbatas menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dalam mengoperasikan Aplikasi Simpeldesa. Hal ini tercermin dari minimnya masyarakat yang mengakses Aplikasi Simpeldesa, sehingga layanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa. Dalam [6] juga disebutkan bahwa akses digital menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi, dan kesenjangan akses digital dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi digital.

Selain faktor akses jaringan internet dan literasi digital, belum adanya regulasi desa yang secara khusus mengatur pelaksanaan Aplikasi Simpeldesa juga menjadi kendala dalam proses implementasi. Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan belum adanya pedoman yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan, pembagian tugas pengelola, serta adanya potensi tumpang tindih wewenang dalam pengelolaan layanan. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan Aplikasi Simpeldesa belum berjalan secara maksimal dan masih bergantung pada pemahaman masing-masing pelaksana. Dalam hal ini, regulasi desa sebagai pedoman penyelenggaraan desa digital sangat penting untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, terarah, dan memiliki kepastian dalam pelaksanaannya [7].

Penelitian terdahulu oleh Abadi, Syeham Surya [8] yang berjudul *Inovasi Pelayanan dan Ekonomi Digital melalui Aplikasi Sempel Desa Cibiru Wetan* menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi Sempeldesa memberikan dampak positif yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain mempermudah proses pelayanan administrasi, Aplikasi Sempeldesa juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan daring melalui fitur dagang yang tersedia. Partisipasi ini mendorong tumbuhnya ekonomi di tingkat desa, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat perekonomian lokal [9].

Dalam penelitian terdahulu oleh Syifa Kartini, Euis Salbiah, Afmi Apriliani [10] yang berjudul *Faktor Pendukung Keberhasilan dan Faktor Penghambat Penerapan Aplikasi Sempeldesa di Desa Cijayanti* disebutkan bahwa Aplikasi Sempeldesa memiliki berbagai fitur yang mempermudah pelayanan publik, dan berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan desa. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa tantangan, seperti masyarakat belum memahami cara mengoperasikan aplikasi, serta terbatasnya akses jaringan internet di sejumlah wilayah.

Sebagaimana dalam penelitian terdahulu oleh Rosita Dwi Novianti dan Isna Fitria Agustina [11] yang berjudul *Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa* mengemukakan bahwa penerapan sistem informasi desa pada dasarnya diharuskan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih cepat, tepat, dan efisien, namun efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, intensitas sosialisasi, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis digital.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagian masyarakat memiliki mindset bahwa aplikasi digital belum menjadi kebutuhan utama, karena urusan administrasi tetap dapat diselesaikan secara manual tanpa bantuan teknologi. Namun, pandangan ini bertolak belakang dengan pernyataan penelitian terdahulu oleh Fauziah Azima, Lucky, Zamzami, Ermita Arif [12] yang berjudul *Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Mensosialisasikan Aplikasi Sempeldesa: Studi Kasus Nagari Lubuak Batingkok Kabupaten Lima Puluh Kota* menegaskan bahwa komunikasi komunikasi yang efektif ditandai oleh adanya saling pemahaman, mampu menciptakan rasa nyaman, memengaruhi sikap, memperkuat hubungan sosial, serta pada akhirnya mendorong terjadinya tindakan nyata.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek administratif, penelitian ini secara khusus menggali implementasi melalui tiga pilar *smart village*, yakni *smart governance*, *smart society*, dan *smart economy*, guna mengetahui fokus penerapan Aplikasi Sempeldesa di Desa Tambak Kalisogo. Penelitian ini mengulas sejauh mana komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo dalam mewujudkan visi pembangunan desa berbasis desa digital.

Penelitian dilaksanakan mengacu pada Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk menilai sejauh mana upaya perwujudan desa digital telah dilaksanakan. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa. Melalui teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai penerapan kebijakan digitalisasi desa yang berkelanjutan.

Dengan aspirasi memberikan gambaran nyata bagi pengembangan model desa digital yang dapat dijadikan percontohan baik di Kabupaten Sidoarjo maupun di berbagai desa di Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan publik, sosial, dan ekonomi di tingkat desa, sekaligus menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan, serta pengembangan aplikasi layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi upaya perwujudan desa digital melalui Aplikasi Sempeldesa di Desa Tambak Kalisogo.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggali pandangan informan mengenai penerapan Aplikasi Sempeldesa di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mengenai dinamika sosial, ekonomi, serta tata kelola desa dalam proses upaya perwujudan desa digital, dengan mengacu pada pengalaman langsung, pihak yang terlibat di lapangan [13]. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer berupa wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Sementara, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup jurnal ilmiah, buku, serta berita dari sumber yang terpercaya. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi upaya perwujudan desa digital melalui Aplikasi Sempeldesa di Desa Tambak Kalisogo. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tahap pengumpulan data, yaitu proses memperoleh informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, reduksi data dilaksanakan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan sesuai fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau diagram agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan meninjau ulang temuan dari data yang disajikan untuk memastikan keabsahan hasil. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni dengan melibatkan kepala desa, operator desa, dan dua masyarakat pengguna Aplikasi Sempeldesa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Komunikasi

Hasil wawancara, pada aspek komunikasi melibatkan empat pihak yang saling berkaitan, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo, PT Telekom Indonesia Tbk khususnya Unit Sidoarjo, Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, serta masyarakat Desa Tambak Kalisogo. Ke empat aktor tersebut memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi dalam satu tujuan yakni upaya mewujudkan desa digital.

Komunikasi antara Diskominfo Sidoarjo dan PT Telkom Unit Sidoarjo terjalin dalam bentuk kerjasama. Diskominfo berperan sebagai inisiator program desa digital, sementara PT Telkom bertindak sebagai pengelola utama yang mendukung penyediaan infrastruktur dan layanan teknis. Selanjutnya, komunikasi antara Diskominfo dan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo dilakukan dalam bentuk penunjukan desa sebagai *pilot project*, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan kebutuhan digitalisasi, baik anggaran maupun penambahan akses jaringan internet. Sementara itu, komunikasi PT Telkom Unit Sidoarjo dengan Pemerintah Desa difokuskan pada penyampaian informasi teknis, pemberian bimbingan, serta evaluasi terhadap jalannya program Simpeldesa. Bentuk komunikasi tersebut diwujudkan melalui serangkaian pertemuan, di antaranya dua kali pertemuan di kantor PT Telkom Unit Sidoarjo dan satu kali di wilayah Trawas.

Berikut hasil wawancara Bapak Agus selaku Operator Desa Tambak Kalisogo.

“Waktu saya yang ikut bimtek di PT Telkom unit Sidoarjo, selama bimtek informasi yang disampaikan cukup jelas, terkait apa yang menjadi program strategis hingga PT Telkom menyediakan Aplikasi Simpeldesa, sempat juga ada uji coba penggunaan aplikasi selama bimtek, dijelaskan di layar monitor, duduk bareng perangkat desa dari desa lain, jadikan bisa sharing bareng-bareng” (Wawancara, 28 Juli 2025).



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Desa Tambak Kalisogo Mengenai Digitalisasi
Sumber: Operator Desa Tambak Kalisogo

Setelah perangkat desa memahami prosedur teknis dan mampu mengoperasikan Aplikasi Simpeldesa, pemerintah Desa Tambak Kalisogo menggelar sosialisasi kepada masyarakat desa. Sosialisasi tersebut diadakan secara terbatas dan berkala dengan menyesuaikan target audiens.

Sebagaimana di sampaikan dalam hasil wawancara Bapak Sugeng selaku Kepala Desa Tambak Kalisogo.

“Sosialisasi pertama kami adakan pada Januari 2024, waktu itu pesertanya pemerintah desa, lembaga desa, dan BPD. Setelah perangkat desa sudah faham mengenai penggunaan aplikasi, kami lanjutkan pada bulan Juni 2024 menasar pada Karang Taruna, RT/RW, PKK, dan kader desa. Lalu, di akhir tahun, Desember 2024, kami kembali mengadakan sosialisasi kepada pelaku UMKM, BUMDes, dan beberapa tokoh masyarakat” (Wawancara, 23 Juli 2025).

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil wawancara Kakak Nanda Irma selaku pemuda Karang Taruna

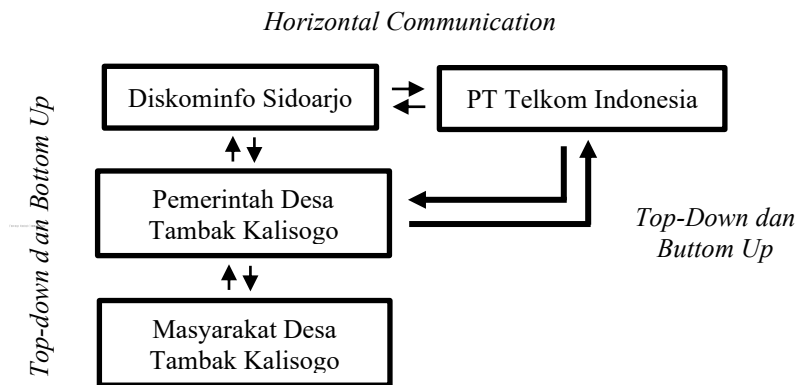
“Sebenarnya ini saya juga baru tau kalo ada aplikasi ini, saya tau nya juga waktu pertemuan karang taruna itu, untuk aplikasi lumayan lengkap fitur-fitur nya” (Wawancara, 2 Agustus 2025).

Sosialisasi dilaksanakan secara terbatas menimbang Aula Kantor Kelurahan Desa Tambak Kalisogo tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sosialisasi dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, masyarakat desa juga dapat menyampaikan komunikasi kepada pemerintah Desa Tambak Kalisogo melalui berbagai fitur di Aplikasi Simpeldesa, seperti pengaduan masyarakat dalam *panic bottom*, laporan kerusakan fasilitas desa dalam lapor desa, serta laporan RT/RW terkait warga pendatang maupun warga meninggal dunia. Selain itu, masyarakat juga dapat mempublikasikan status kegiatan melalui fitur forum desa. Dengan ketentuan setiap informasi

yang diunggah oleh masyarakat, terlebih dahulu melalui proses penyaringan oleh operator pemerintah Desa Tambak Kalisogo, sebelum akhirnya dipublikasikan.

Berikut hasil wawancara Bapak Agus selaku operator Desa Tambak Kalisogo.

“Semua postingan warga desa pada forum desa itu harus disaring dulu informasinya oleh pemerintah desa terutama saya sebagai operator. Yaa.. biasanya yang di posting warga itu kegiatan bersih-bersih, potong rumput, ikut kegiatan normalisasi sungai, acara posyandu desa, kadang juga posting jualannya, nasi untuk pesanan begitu” (Wawancara, 23 Juli 2025).



Gambar 4. Alur Komunikasi Implementasi Desa Digital

Sumber: Dikelola penulis (2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis proses alur komunikasi dalam implementasi Aplikasi Simpeldesa di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan beberapa bentuk alur komunikasi organisasi. Sebagaimana dalam buku “Komunikasi Organisasi” oleh [14] Komunikasi Diskominfo Sidoarjo dan pemerintah desa bersifat *top-down* dan *bottom-up*, yang mencerminkan adanya aliran informasi dua arah. *Top-down communication* memastikan kebijakan strategis dari Diskominfo, dan dilaksanakan sesuai visi *smart city*. Sementara *bottom-up communication* memberi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan kebutuhan dan masalah yang terjadi di lapangan. Komunikasi tersebut sejalan dengan konsep komunikasi organisasi yang menekankan pentingnya arus informasi dua arah untuk menciptakan keselarasan tujuan dan meningkatkan efektivitas implementasi program.

Selain itu, komunikasi Diskominfo Sidoarjo dan PT Telkom Indonesia terjalin dengan pola *horizontal communication*, di mana kedua pihak memiliki posisi relatif setara dan bertukar informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan inovasi teknologi. Hubungan timbal balik tersebut mendorong sinergi antar organisasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini komunikasi horizontal berfungsi memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pencapaian tujuan bersama.

Hubungan komunikasi Diskominfo Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo menunjukkan pola komunikasi dua arah yakni *top-down* dan *bottom-up*. Diskominfo berada pada posisi dominan dalam menentukan arah kebijakan dan kerangka implementasi program desa digital, sementara Pemerintah Desa Tambak Kalisogo berperan sebagai pelaksana sekaligus penghubung yang menerjemahkan kebijakan kepada masyarakat. Mekanisme *bottom-up* memberi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan kebutuhan dan kendala di lapangan, tetapi perannya terbatas pada fungsi umpan balik, belum menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan.

Komunikasi PT Telkom Unit Sidoarjo dan Pemerintah Desa menunjukkan pola komunikasi dua arah. Pada sisi *top-down*, PT Telkom berperan menyampaikan informasi teknis, bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi terhadap penerapan program. Pada sisi *bottom-up*, Pemerintah Desa berperan memberikan umpan balik berupa laporan kendala teknis, menyampaikan kebutuhan tambahan pelatihan, serta masukan penyempurnaan fitur aplikasi. Pola komunikasi dua arah ini memungkinkan terciptanya dialog yang partisipatif dan adaptif.

Sementara itu, komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat bersifat dua arah *top-down dan bottom-up*, sesuai prinsip komunikasi partisipatif. Pemerintah desa berperan mensosialisasikan program dan mengedukasi masyarakat, sedangkan masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan serta memberikan umpan balik secara digital. Pola ini mencerminkan pendekatan komunikasi yang demokratis, yang menurut teori komunikasi organisasi dapat meningkatkan keterlibatan publik, dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Dalam Teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, menyatakan bahwa keberhasilan variabel komunikasi diukur melalui tiga indikator, yakni transmisi (*transmission*), kejelasan pesan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Pada indikator transmisi (*transmission*), menjelaskan bahwa komunikasi yang tersampaikan secara

efektif akan mendukung tercapainya implementasi kebijakan yang optimal. Hal tersebut didasarkan pada hasil identifikasi melalui alur komunikasi organisasi yang menunjukkan bahwa proses komunikasi antar pihak berjalan dengan baik. Setiap pihak mampu menyampaikan kebutuhan, saran, serta memberikan umpan balik (*feedback*) secara terbuka. Adanya mekanisme tersebut menunjukkan bahwa komunikasi berlangsung secara dua arah, sehingga informasi dapat dipahami dengan baik serta meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam, indikator kejelasan (*clarity*) menyatakan, bahwa informasi yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan harus disusun secara jelas, tegas, mudah dipahami. Pengertian tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Operator Desa Tambak Kalisogo yang menyatakan bahwa selama masa bimbingan teknis yang diberikan oleh PT Telkom Unit Sidoarjo dapat di fahami dengan jelas, dan selama bimbingan teknis juga dilaksanakan uji coba penggunaan Aplikasi Simpeldesa oleh perangkat desa. Sehingga pemerintah desa dapat memahami cara kerja Aplikasi Simpeldesa secara langsung.

Lebih lanjut, indikator konsistensi (*consistency*), instruksi yang disampaikan dalam proses komunikasi harus konsisten agar dapat dilaksanakan dengan tepat. Jika arahan sering berubah, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara, konsistensi komunikasi terlihat dari keberlanjutan pola arahan yang diterima oleh pelaksana. Instruksi yang diberikan oleh Diskominfo Sidoarjo dan PT Telkom Unit Sidoarjo sejak tahap sosialisasi hingga operasional relatif stabil, terutama terkait prosedur pelayanan, mekanisme pendataan, dan fungsi utama aplikasi.

Hasil analisis aspek komunikasi berjalan efektif, sebagaimana tercermin dalam menyampaikan informasi kebijakan yang memiliki komunikasi timbal balik antar aktor, dipahaminya substansi kebijakan oleh pelaksana melalui bimbingan teknis, serta terjaganya konsistensi arahan dari tahap sosialisasi hingga operasional. Keadaan tersebut berkontribusi dalam mengurangi potensi distorsi informasi, serta memperkuat kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan praktik implementasi di tingkat desa.

Sejalan dengan temuan tersebut, hasil penelitian [12] juga turut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program digital di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat. Komunikasi yang dibangun secara baik tentunya menjadi faktor penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya cita-cita desa digital.

Lebih lanjut, dalam penelitian [15] juga menyatakan bahwa penerapan Aplikasi Simpeldesa belum sepenuhnya merata karena terbatasnya akses informasi sosialisasi. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam menerapkan Aplikasi Simpeldesa. Informasi dan sosialisasi memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi desa digital.

B. Aspek Sumber Daya

Dalam hasil wawancara, peneliti mendapati empat indikator sumber daya, yakni anggaran, keterampilan staf, fasilitas, dan fitur Aplikasi Simpeldesa. Pada aspek anggaran desa, mekanisme pengajuan anggaran melalui proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa, dengan jumlah yang bersifat fluktuatif atau tidak menentu, bergantung pada kebutuhan program.

Adapun dalam hasil wawancara Bapak Agus selaku operator Desa Tambak Kalisogo menyampaikan, *“Kalo tahun 2023 itu cukup besar karena kita pengadaan, akan tetapi 2024, 2025 ini relative kecil karena kita hanya pemeliharaan, dan perlu ditegaskan kembali anggaran ini tidak hanya untuk Aplikasi Simpeldesa tapi juga mencakup seluruh anggaran digitalisasi desa”* (Wawancara, 28 Juli 2025).

Pada aspek keterampilan staf, pengelolaan Aplikasi Simpeldesa dilaksanakan oleh operator desa, kaur perencanaan umum, kaur tata usaha, serta kasi pelayanan. Meskipun demikian, pengoperasian Aplikasi simpeldesa masih bergantung pada satu orang operator utama. Hal ini kompetensi perangkat desa yang ditunjuk sebagai operator aplikasi belum sepenuhnya memenuhi syarat, sehingga menimbulkan tingginya beban kerja pada satu operator utama.

Pada indikator fasilitas, terdapat dua aspek utama yang mendukung implementasi Aplikasi Simpeldesa, yakni perangkat keras dan sistem jaringan. Perangkat keras yang digunakan meliputi komputer, laptop, dan telepon seluler. Keberadaan perangkat tersebut menjadi sarana utama dalam pengoperasian Aplikasi Simpeldesa. Namun, pada telepon seluler, tidak semua perangkat dapat menginstal Aplikasi Simpeldesa, aplikasi tersebut hanya dapat diakses pada perangkat Android dan belum mendukung perangkat iOS. Saat ini, Desa Tambak Kalisogo memiliki tiga unit komputer utama dan empat unit laptop yang difungsikan sebagai sarana operasional.

Selain perangkat keras, sistem jaringan internet menjadi faktor penting dalam menunjang ketersediaan fasilitas. Desa Tambak Kalisogo berlokasi relatif jauh dari pusat Kota Sidoarjo, sehingga menghadapi kendala keterbatasan akses jaringan internet. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas akses internet yang diterima oleh perangkat desa maupun masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Desa Tambak Kalisogo menyampaikan kebutuhan peningkatan akses jaringan internet kepada Diskominfo Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian diteruskan kepada PT Telkom Unit Sidoarjo. Sebagai tindak lanjut, PT Telkom Unit Sidoarjo melakukan penambahan titik akses jaringan di beberapa lokasi, salah satunya di Dusun Bangunsari.

Pada aspek fitur, Aplikasi Simpeldesa mengusung tiga pilar *Smart Village*, yaitu *Smart Governance*, *Smart Society*, dan *Smart Economy*. Ketiga pilar tersebut diwujudkan melalui berbagai fitur yang dirancang untuk mendukung layanan pemerintahan desa, memperkuat kanal gotong royong dan jejaring sosial, serta menciptakan ekosistem ekonomi maju. Keluaran dari fitur-fitur tersebut disajikan dalam bentuk grafik dan angka yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi tidak semua fitur di dapat di adopsi dan diterapkan khususnya Layanan Surat pada pilar *Smart Governance* yang memungkinkan tumpang tindih peran.

Hasil wawancara Bapak Agus selaku operator desa Tambak Kalisogo.

“Fokus Aplikasi Simpeldesa itu untuk publikasi dan updateing data, karena pelayanan surat kependudukan itu sudah ada di SIPRAJA yang sesuai dengan kebijakan Perbup Sidoarjo. Itu sudah paten, jikapun beralih ke Simpeldesa komunikasi pemerintah desa dan pemerintah kabupaten akan kesulitan, masyarakat juga akan bingung” (Wawancara, 28 Juli 2025).

Berikut beberapa fitur yang tersedia dalam Aplikasi Simpeldesa

Tabel 1. Fitur Aplikasi Simpeldesa

FITUR	PENGERTIAN	AKTIF	TIDAK
Smart Governance			
Data Warga	Informasi manajemen data desa terkait penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan, yang hanya dapat diakses oleh operator desa dan kepala desa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Layanan Surat	Tidak berjalan, karena memakai Aplikasi SIPRAJA sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Aplikasi SIPRAJA		<input checked="" type="checkbox"/>
Laporan Stunting	Berisi mengenai data informasi stunting, dan profil posyandu	<input checked="" type="checkbox"/>	
Berita Desa	Informasi kegiatan desa, dan perencanaan pembagunan	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lapor Desa	Saran, kritik, dan ide mengenai pelayanan, kebijakan bahkan kerusakan fasilitas desa kepada pemerintah desa atau BPD	<input checked="" type="checkbox"/>	
Smart Society			
Forum Desa	Pertukaran informasi antar masyarakat, membangun koneksi, dan diskusi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Panic Button	Laporan masyarakat mengenai kondisi darurat (pencurian, begal, KDRT)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Simpel Donasi	Penggalangan dana bencana, bantuan masyarakat miskin, dan kematian	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desa Sehat	Konsultasi kesehatan bersama bidan desa dan simpel donor, yang kemudian tersortir berdasarkan jenis golongan darah	<input checked="" type="checkbox"/>	
Smart Economy			
Pasar Desa	Marketplace online dalam lingkup desa yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan rumah tangga, baik grosir maupun ecer.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pembayaran Tagihan (PPOB)	Pembayaran tagihan elektronik maupun transaksi digital (token listrik, pulsa dan paket data, IndiHome, PDAM, serta BPJS)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mitra BUMDes	Transaksi digital yang kemudian uang masuk dikelola BUMDes, dan berputar untuk perekonomian desa. Selain itu juga melayani transaksi langsung untuk warga yang tidak memiliki aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ads Management	Space iklan diperuntukkan perusahaan atau politisi untuk beriklan (berbayar)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Sumber: Dikelola Penulis (2025)

Dengan demikian penggunaan Aplikasi Simpeldesa kemudian difokuskan pada publikasi dan pemutakhiran data secara berkala. Keputusan ini mencegah terjadinya tumpang tindih layanan yang dapat membingungkan masyarakat, dan memperlambat proses administrasi. Fokus pada publikasi dan pemutakhiran data ini justru menjadi keunggulan Aplikasi Simpeldesa. Fitur-fitur yang tersedia memudahkan pemerintah desa dalam memperoleh data yang akurat dan mudah di analisis, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan.

Akurasi data dijaga melalui mekanisme pemutakhiran data yang dilakukan dua bulan sekali melalui pertemuan di Balai Desa Tambak Kalisogo. Dalam pertemuan tersebut, ketua RT menyampaikan laporan mengenai kondisi masing-masing wilayah kerjanya, seperti warga yang meninggal dunia, berpindah domisili, atau penduduk baru. Setelah laporan di verifikasi, operator desa akan memperbarui data pada Aplikasi Simpeldesa dengan cara menandai, menghapus, kemudian menambahkan informasi. Mekanisme tersebut membantu pemerintah Desa Tambak Kalisogo

memperoleh data aktual. Dibandingkan pada praktik sebelumnya pemutakhiran data hanya dapat diketahui pada akhir tahun.

Adapun berikut hasil wawancara Bapak Agus selaku operator Desa Tambak Kalisogo

“Keluaran data tersebut jelas, dan sangat membantu pemerintah desa dalam mengambil langkah kebijakan. Seperti di sini kan terlihat berapa warga yang pendidikan terakhirnya SD atau tidak sekolah. Dan ini dapat dijadikan acuan bahwa masih banyak masyarakat yang buta huruf, maka pemerintah desa dapat mengambil langkah kebijakan atau pengadaan program kelas baca untuk mengentaskan masyarakat dari buta huruf” (Wawancara, 28 Juli 2025).

Ketersediaan data yang mutakhir memastikan proses identifikasi kebutuhan desa lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi nyata.

Dalam Teori Implementasi George C. Edward III, aspek sumber daya meliputi beberapa indikator, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Indikator staf menjadi salah satu sumber daya utama dalam proses implementasi kebijakan. Kegagalan implementasi kerap terjadi akibat keterbatasan jumlah staf maupun kurangnya kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara, perangkat desa yang menjadi operator Aplikasi Simpeldesa berjumlah empat orang, akan tetapi meskipun jumlah staf dalam kategori cukup, masih terdapat tumpuan beban kerja yang tinggi pada satu operator utama. Kondisi ini menyebabkan tingginya intensitas kerja pada individu tersebut, sehingga perlu diimbangi dengan distribusi tugas yang lebih proporsional.

Indikator informasi kepatuhan berkaitan dengan tingkat kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah yang telah ditetapkan. Para pelaksana perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui kepatuhan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo dalam penggunaan Fitur Layanan Surat pada Aplikasi Simpeldesa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Aplikasi Android SIPRAJA. Selanjutnya, mengenai Aplikasi E-Buddy yang di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo [16]. Sebagaimana hasil wawancara pemerintah Desa Tambak Kalisogo berkomitmen, tetap mengikuti, dan patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan yakni untuk layanan surat masyarakat dilaksanakan melalui Aplikasi SIPRAJA, sedangkan layanan surat kedinasan dikelola melalui Aplikasi E-Buddy [17].

Pada indikator wewenang, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dijalankan. Wewenang merupakan bentuk legitimasi bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya kewenangan, posisi pelaksana tidak memiliki kekuatan di mata publik, sehingga berpotensi menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini kewenangan Desa Tambak Kalisogo sebagai pelaksana kebijakan di dasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Tentang Penetapan Desa *Pilot Project* Digitalisasi. Keberadaan surat keputusan tersebut menjadi dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada pemerintah Desa Tambak Kalisogo dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan implementasi desa digital. Dengan adanya landasan formal tersebut, perangkat desa memiliki kepastian kewenangan dalam mengoperasikan aplikasi, melakukan pendataan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat melalui sistem digital.

Indikator fasilitas menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah dirancang dengan baik tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Melalui hasil wawancara, Aplikasi Simpeldesa belum mendukung pada perangkat iOS yang tentu membuat minim kepuasan pengguna. Jumlah perangkat keras yang tersedia relatif terbatas jika dibandingkan dengan jumlah perangkat desa dan jenis layanan yang dijalankan. Sistem jaringan di Desa Tambak Kalisogo mengalami kendala keterbatasan akses internet, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital dalam mendukung implementasi kebijakan berbasis teknologi.

Kendala jaringan internet di Desa Tambak Kalisogo menegaskan bahwa infrastruktur merupakan prasyarat utama keberhasilan digitalisasi. Langkah strategis pemerintah desa berkoordinasi dengan Diskominfo dan PT Telkom hingga terwujudnya penambahan titik akses jaringan menunjukkan kapasitas adaptif desa dalam mengatasi hambatan implementasi. Kehadiran jaringan yang memadai menjadi katalis penting agar inovasi pelayanan publik berbasis digital, termasuk Aplikasi Simpeldesa dapat berjalan optimal [18].

Hasil analisis aspek sumber daya menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi Simpeldesa di Desa Tambak Kalisogo telah memiliki dasar kewenangan yang memadai dan telah memenuhi kepatuhan regulasi pemerintah daerah, akan tetapi dalam implementasinya Desa Tambak Kalisogo menghadapi keterbatasan kapasitas staf dan ketersediaan sarana pendukung, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi staf desa dan peningkatan infrastruktur digital.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian [19] yang menunjukkan keberhasilan implementasi pengembangan digitalisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia dalam penguasaan program, akses jaringan internet, serta kondisi ekonomi masyarakat yang memungkinkan sebagian masyarakat tidak memiliki perangkat seluler. Dengan demikian, pemerataan akses internet menjadi kebutuhan mendesak, dan tidak hanya bagi Desa Tambak Kalisogo, tetapi juga bagi desa yang tengah berupaya mewujudkan pembangunan *smart village* [20].

C. Aspek Disposisi

Hasil wawancara, pada tanggal 3 Januari 2025, Kepala Desa bersama Perangkat Desa Tambak Kalisogo melaksanakan penyambutan kunjungan kerja dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang menunjukkan semangat, antusiasme tinggi saat pertemuan. Dalam kesempatan tersebut, Wamen Komdigi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah transformasi digital yang telah dijalankan, serta menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan desa digital melalui kebijakan, pendampingan, dan peningkatan infrastruktur.

Meski demikian, perjalanan menuju transformasi desa digital tidak lepas dari berbagai tantangan. Pemerintah desa perlu memperhitungkan kondisi riil di lapangan, seperti keterbatasan akses jaringan internet, dan rendahnya pemahaman literasi digital. Tantangan tersebut menuntut komitmen kuat dari pemerintah desa untuk terus menjaga antusiasme masyarakat, dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat beradaptasi, dan berpartisipasi aktif dalam proses transformasi digital.

Berikut hasil wawancara operator Desa Tambak Kalisogo, Bapak Agus, beliau menyatakan mengenai komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan desa digital.

“Tantangan itu pasti ada, tapi itu kembali bagaimana cara kita, ‘orang desa’ menyikapi hal tersebut. Jangan sampai kesempatan baik ini justru jadi sia-sia karena tidak diperhatikan baik oleh pemerintah desa. Kita akan terus cari bagaimana solusinya. Jaringan tidak memadai? kita minta jaringan ke PT Telkom, masyarakat tidak mengerti? kita suruh anak atau saudaranya untuk mendampingi”.

Lebih lanjut

“Tidak ada yang tidak mungkin untuk mewujudkan smart city. Konsep smart city itu lahir dari desa pintar atau smart village. Di sisi lain perkembangan teknologi juga fatal jika ditinggal. Zaman terus berkembang dan berjalan, semua administrasi di masa depan akan menjadi paperless. Jadi mau tidak mau harus di ikuti dan dipelihara” (Wawancara, 28 Juli 2025).

Di sisi lain, sikap dan antusiasme masyarakat Desa Tambak Kalisogo terhadap masuknya perkembangan teknologi menunjukkan respons positif. Masyarakat menyambut transformasi digital dengan penerimaan yang bijak, serta memahami bahwa Aplikasi Simpeldesa memiliki banyak fitur unggulan, khususnya pada layanan *smart economy*. Tidak jarang masyarakat meminta agar aplikasi segera dioperasikan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Agus selaku operator Desa Tambak Kalisogo

“Warga itu senang sekali dan antusias saat tau ada aplikasi jualan online yang aman milik pemerintah, mereka sering tanya ‘kapan mulai launching mas? kapan bisa jualan?’. Kalo kayak platform online, shopee, atau lazada kan belum tentu semua bisa mengikuti, kayak facebook belum tentu juga penjualannya aman. Lah kalo simpeldesa kan memang sudah aman kita pantau, ada sosialisasi dari pemerintah desa dan di ajari sampai bisa” (Wawancara, 28 Juli 2025).

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilaksanakan Peneliti kepada warga Desa Tambak Kalisogo, Ibu Romlah sebagai pengusaha catering yang menggunakan Aplikasi Simpeldesa, beliau menyampaikan.

“Saya sudah pernah diajari anak perempuan saya, jualan pakai aplikasi go-food terus shopee food, tapi saya ga bisa rumit. Tapi kalo dari desa kemarin, diajari, yaa.. saya faham sedikit sedikit, sama seperti umumnya buat status di whatsapp” (Wawancara, 29 Juli 2025).

Tampilan Aplikasi Simpeldesa dirancang sederhana sehingga mudah dipahami, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses perdagangan daring. Hal yang sama juga berlaku pada fitur forum masyarakat yang memungkinkan masyarakat dapat saling berinteraksi dan diskusi secara daring.



Gambar 5. Kunjungan Wamen Komdigi RI ke Desa Tambak Kalisogo

Sumber: Operator Desa Tambak Kalisogo

Dalam Teori Implementasi George C. Edward III, disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan menunjukkan sikap positif serta mendukung kebijakan, maka peluang keberhasilan implementasi semakin besar. Sebaliknya, jika terdapat penolakan atau konflik kepentingan, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan.

Dari hasil wawancara implementasi Aplikasi Simpeldesa di Desa Tambak Kalisogo tercermin kuat komitmen positif para aktor pelaksana kebijakan, terutama kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyambut transformasi digital, dan memandangnya transformasi digital sebagai peluang dalam meningkatkan efisiensi manajemen data, sekaligus transparansi pelayanan publik. Lebih kuat, komitmen para aktor tercermin dari legitimasi dan apresiasi yang di berikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atas upaya digitalisasi desa, sebagaimana dalam kunjungan kerjanya Januari 2025.

Sikap masyarakat juga menunjukkan kecenderungan positif terhadap digitalisasi desa. Masyarakat menerima dan menyambut baik kehadiran Aplikasi Simpeldesa, terutama pada fitur dagang *online* yang dinilai lebih aman dibandingkan platform komersial lain. Partisipasi aktif pun tampak sejak awal, misalnya melalui keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemasangan jaringan internet. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan turut berperan aktif dalam pembangunan desa digital [21]. Meski demikian, semangat tersebut tidak terlepas dari tantangan keterbatasan jaringan internet dan rendahnya literasi digital, khususnya di kalangan masyarakat lanjut usia. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk terus bersikap adaptif dalam menghadirkan solusi terbaik.

Hasil analisis menunjukkan sikap positif dan komitmen para pelaksana kebijakan tercermin dalam penerimaan proses digitalisasi desa baik dari pemerintah pusat, sampai dengan pemerintah desa. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai hambatan teknis dan keterbatasan kapasitas pengetahuan masyarakat yang mempengaruhi cara pelaksana mengeksekusi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumen Edward III bahwa disposisi positif merupakan prasyarat penting, tetapi tidak signifikan menjamin keberhasilan implementasi kebijakan apabila tidak diiringi dengan dukungan sumber daya yang memadai.

Temuan ini sejalan dengan penelitian [22] yang menekankan disposisi positif dari perangkat desa dan masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi Simpeldesa. Tanpa dukungan sikap yang kuat, program digitalisasi berpotensi stagnan meski ditopang oleh sumber daya yang memadai. Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan penelitian [23] yang mengungkapkan bahwa sikap adaptif perangkat desa dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur dan literasi digital menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program *smart village*.

D. Aspek Struktur Birokrasi

Dalam hasil wawancara, struktur birokrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Tambak Kalisogo telah ideal dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perangkat desa meliputi sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), serta kepala dusun, yang masing-masing memiliki tugas serta fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembagian peran yang jelas dalam struktur organisasi berdampak pada terbentuknya alur koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Kejelasan fungsi setiap perangkat desa memungkinkan proses kerja berjalan terarah, mengurangi tumpang tindih wewenang, serta mempercepat penyelesaian tugas administrasi. Sebagaimana di sampaikan Bapak Sugeng selaku Kepala Desa Tambak Kalisogo kepada Peneliti.

“Struktur organisasi di Desa Tambak Kalisogo sudah di susun sesuai dengan peraturan Permendagri, pembagian tugas sekretaris desa, kaur, kasi, dan kepala dusun sudah jelas, sehingga masing-masing sudah mengetahui tanggung jawabnya. Akan tetapi untuk regulasi desa mengenai Aplikasi Simpeldesa belum ada” (Wawancara, 23 Juli 2025).

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil wawancara Peneliti bersama Bapak Agus selaku operator desa Tambak Kalisogo.

“Kalo SOP internal punya, tapi untuk peraturan desa mengenai Aplikasi Simpeldesa itu belum ada, tapi insyaallah nanti kita usahakan bersama” (Wawancara, 28 Juli 2025).

Ketiadaan regulasi desa yang secara khusus mengatur pelaksanaan Aplikasi Simpeldesa menyebabkan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo belum memiliki dasar dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa untuk bersikap lebih berhati-hati dalam menjalankan penggunaan aplikasi sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT Telkom sebagai otoritas lembaga yang lebih tinggi.

Adapun di bawah ini struktur birokrasi Pemerintah Desa Tambak Kalisogo.



Gambar 6. Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo
Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo

Dalam Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi dipandang sebagai unsur penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Meskipun sumber daya telah tersedia dan para pelaksana memiliki kompetensi yang memadai, lemahnya struktur birokrasi dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal. Struktur birokrasi yang lemah dapat ditandai dengan pembagian tugas yang tidak jelas, prosedur kerja yang berbelit, serta koordinasi antar lembaga yang tidak efektif. Kondisi tersebut menyebabkan sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik dan pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pengelolaan Aplikasi Simpeldesa, diketahui bahwa belum tersedia regulasi desa yang secara khusus mengatur pembagian tugas, tata kerja, serta mekanisme koordinasi antarperangkat desa. Akibatnya, pengelolaan aplikasi cenderung terpusat pada operator desa, sementara perangkat desa lainnya belum memiliki peran yang terdefinisi secara jelas dalam mendukung proses pelayanan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi di Desa Tambak Kalisogo masih bersifat administratif, belum sepenuhnya fungsional. Ketiadaan pengaturan internal menyebabkan alur kerja penggunaan aplikasi belum terintegrasi secara sistematis.

Hasil analisis menegaskan ketiadaan regulasi desa yang secara khusus mengatur terkait pelaksanaan desa digital Aplikasi Simpeldesa berpotensi menimbulkan ketergantungan pada individu tertentu seperti operator desa, dikarenakan tidak ada kejelasan pembagian tugas, hal tersebut dapat melemahkan koordinasi antar fungsi perangkat desa. Apabila dikaitkan dengan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut mencerminkan adanya kelemahan kapasitas kelembagaan, serta mengakibatkan proses kerja menjadi tidak sistematis.

Hasil analisis selaras dengan penelitian [24] yang menunjukkan bahwa meskipun sumber daya dan komunikasi program desa digital telah tersedia, kurangnya SOP dan aturan internal menyebabkan struktur birokrasi menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa, sehingga program tidak berjalan optimal. Selain itu dalam penelitian [25] di Desa Banjararum juga menemukan bahwa pelayanan publik berbasis digital belum berjalan maksimal akibat lemahnya koordinasi antar perangkat desa dan belum adanya aturan teknis yang mengikat. Perangkat desa masih bekerja berdasarkan kebiasaan lama dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan sistem digital yang diterapkan.

IV. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Aplikasi Simpeldesa di Desa Tambak Kalisogo pada Aspek komunikasi berjalan melalui komunikasi dua arah, kejelasan informasi, dan konsistensi kebijakan. Pada aspek sumber daya, implementasi didukung oleh dasar kewenangan, dan telah memenuhi kepatuhan regulasi, serta keterlibatan aktif perangkat desa dalam pengoperasian aplikasi, meskipun terdapat keterbatasan akses jaringan internet dan literasi digital. Pada aspek disposisi, pemerintah desa dan masyarakat mencerminkan penerimaan positif terhadap pengembangan desa digital. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, Pemerintah Desa Tambak Kalisogo belum memiliki regulasi desa yang secara khusus mengatur pengelolaan Aplikasi Simpeldesa. Melalui hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman dan sikap pelaksana, tetapi juga oleh dukungan fasilitas dan kapasitas organisasi yang memungkinkan kebijakan dapat dijalankan secara konsisten pada tingkat operasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sugeng selaku Kepala Desa Tambak Kalisogo atas pemberian izin penelitian, serta Bapak Nurul Agus Irawan selaku Operator Desa yang telah memberikan dukungan berupa data serta berbagi pengalaman selama proses wawancara dan observasi. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada masyarakat yang bersedia menjadi informan, khususnya Saudari Nanda Irma dan Ibu Romlah, atas kesediaannya berbagi pandangan dan pengalaman terkait penggunaan Aplikasi Simpeldesa. Tanpa dukungan, keterbukaan, dan partisipasi dari seluruh informan, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik.

REFERENSI

- [1] E. A. M. Sampetoding, M. Sadno, M. A. Siddik, E. S. Rusdi, H. Mesra dan J. Gormantara, "Sosialisasi Konsep Smart Village Berdasarkan SDGs," *Community Professional Service Journal*, pp. 01-10, 2024.
- [2] Y. Armelin, R. S. Utama dan F. S. Wibowo, "Digitalisasi Desa Berbasis Aplikasi "Simpeldesa": Inovasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Desa Cibiru Wetan," *TheJournalish: Social and Government*, pp. 73-92, 2023.
- [3] D. S. Kartini, S. I. Redjo dan R. Mulyawan, "Government Village Competency in Realizing Digital Government through Simpeldesa Application in Bandung District," *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social, and Political Science*, pp. 86-94, 2023.
- [4] M. Setiowati dan I. F. Agustina, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskuedes dalam Pelaporan Keuangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon," *Jurnal Publicuho*, pp. 1663-1676, 2024.
- [5] A. S. Auliandini, "Implementasi E-Goverment Berbasis Aplikasi Simpeldesa dalam Ssitem Pelayanan di Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Praxisideal*, pp. 1-15, 2024.
- [6] A. Koswara, "Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, pp. 180-187, 2024.
- [7] F. I. Setyawati, "Menuju Desa Digital Inklusif: Implementasi E-Government Pada Website Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo," *Journal of Public Administration and Governance Insights (PAGI)*, pp. 22-31, 2025.
- [8] A. dan S. Surya, "Inovasi Pelayanan dan Ekonomi Digital melalui Aplikasi Sempel Desa Cibiru Wetan," *Digital Library UIN Sunan Gunung Jati*, pp. 1-18, 2024.
- [9] R. Ainiyah, S. Burhan, M. F. Ardiansyah dan D. P. Fidanti, "Pengembangan Desa Digital Sebagai Upaya Mengangkat Potensi Lokal Desa Karangrejo," *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat*, pp. 13-18, 2021.
- [10] S. Kartini, E. Salbiah dan A. Apriliani, "Faktor Pendukung Keberhasilan dan Faktor Penghambat Penerapan Aplikasi Simpeldesa di Desa Cijayanti," *Karimah Tauhid*, pp. 6642-6654, 2024.
- [11] R. D. Novianti dan I. F. Agustina, "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa," *Indonesian Journal of Public Policy*, pp. 1-12, 2024.
- [12] F. Azima, L. Zamzami dan E. Arif, "Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Mensosialisasikan Aplikasi Simpeldesa: Studi Kasus Nagari Lubuak Batingkok Kabupaten Lima Puluh Kota," *Education and Social Sciences Review*, pp. 38-45, 2024.
- [13] J. W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publications Ltd., 2014.
- [14] R. T. Siregar, U. Enas, D. E. Putri, I. Hasbi, A. H. Ummah, O. Arifun, I. M. Hanika, E. Zusrony, R. Chairunnisah, H. Ismainar, S. A. Bairizki, A. S. Lestari dan M. M. Utami, *Komunikasi Organisasi*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- [15] A. N. S. Bela, "Efektivitas Implementasi Program Simpeldesa dalam Pelayanan Administrasi Kantor Desa," *University of Islam Malang Repository*, pp. 1-19, 2023.
- [16] E. Apreliyanto dan I. F. Agustina, "SIPRAJA Application-Based Village Governance Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Aplikasi SIPRAJA," *International Scientific Research Journal*, pp. 1-12, 2023.
- [17] M. U. Albab dan I. F. Agustina, "Pengelolaan Surat Resmi Digital Menggunakan Aplikasi E-Buddy Sidoarjo," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, pp. 1-14, 2024.

- [18] D. S. Kartini, S. I. Redjo dan R. Mulyawan, "Government Village Competency in Realizing Digital Government through Simpeldesa Application in Bandung District," *International Conference on Law, Social, and Political Science*, pp. 1-9, 2023.
- [19] S. A. M. Babys, E. Prayitno dan E. Benu, "Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Desa Digital di Indonesia," *Jurnal Oratio Directa*, pp. 1098-1118, 2024.
- [20] Cahyani, Hilman, Sanditari, Ridwan, Dewanti, Sutina, Hamidah, Yuliasari, Wulandari dan Rustandi, "UNFARI Membangun Desa Menuju Masyarakat Mandiri Melalui Aplikasi "Simpeldesa" di Desa Pakuhaji, Ngamprah, KBB," *Jurnal PKM BABAkti*, pp. 30-36, 2023.
- [21] F. W. Kilmanun dan S. I. Telussa, "Transformasi Informasi Digital untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Studi Strategis atas Peran Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, pp. 185-199, 2025.
- [22] S. Khaerunisa, U. Syamsudin dan M. I. Rantau, "Implementasi Smart Village dalam Mewujudkan Desa Digital di Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang," *Journal Of Social Science Research*, pp. 8386-8400, 2024.
- [23] T. P. Kusuma, A. Nurjaman, S. dan S. H. Malawat, "Analisis Tantangan dan Potensi Pengembangan Digitalisasi Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, pp. 100-114, 2022.
- [24] S. dan E. Siswanto, "Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember," *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, pp. 1-9, 2023.
- [25] L. Musdalifah, S. dan S. , "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Digital," *Jurnal Respon Publik*, pp. 54-63, 2025.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.